

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019

Danil Sanjaya^{1*}, Herlina Helmy²

¹Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

²Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: danilsanjaya525@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the effect of Regional Original Income (PAD), regional Asset and Excess Budget Financing (SILPA) on Capital Expenditure with Economic Growth as a Moderating Variable in Provincial Governments throughout Indonesia 2015-2019. The data use in this study is the report on the realization of APBD for the 2015-2019 fiscal year which is available on the DJPK website. The population and sample in this study ara all provincial governments in Indonesia consisted of 34 provinces from 2015-2019 with a total of 170 data. Hypothesis testing in this study uses the Moderated Regression Analysis (MRA) test. The result show that PAD has no significant effect on capital expenditure, Regional Wealth and SILPA have a significant effect and simultaneously independent variables have a significant effect on the dependent variable, Economic Growth strengthens the influence of PAD and SILPA on capital expenditure and Economic Growth weakens Regional wealth on Capital Expenditure.*

Keywords: *Original Regional Income, Regional Wealth, Remaning Budget Financing, Capital Expenditures, Economic Growth.*

How to cite (APA 6th style)

Sanjaya, D & Hekmy. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kekayaan Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderasi pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Periode 2015-2019. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 3(2). 450-469.

PENDAHULUAN

Berawal dari peristiwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan pada tahun 1998 Indonesia puncak dari masalah tersebut yang mana pada tahun tersebut disebut sebagai tahun krisis moneter, hal tersebut membuat perekonomian Indonesia terpuruk sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan Otonomi Daerah (Erdi & Rachmawati, 2015). Menurut Andre (2014) pemerintah melakukan reformasi bertujuan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia baik dibidang pemerintahan maupun dibidang pengelolaan. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tersebut beriringan dengan tujuan dari kebijakan

otonomi daerah.

Yang mana tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah pemerintah daerah diminta untuk dapat menciptakan kemandirian daerahnya masing-masing dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik serta pemerintah daerah diminta untuk dapat membangun daerah dengan menggali potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah agar dapat mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Ikhwan, 2011). Menurut Widya (2018) kebijakan dan strategi yang perlu ditentukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan yang diinginkan salah satunya adalah peningkatan investasi suatu daerah.

Menurut Prasetya (2015) sumber kekayaan yang dimiliki oleh daerah tidak sebanding dengan kebutuhan fiskal setiap daerah membuat pemerintah daerah dihadapkan dengan masalah kebutuhan fiskal yang sangat tinggi, hal ini menyebabkan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dana perimbangan seperti dana alokasi umum (DAU) adalah bantuan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (DAU) (Erdi & Rachmawati, 2015). Pemerintah pusat berharap kepada pemerintah daerah agar pembangunan dan pelayanan setiap daerah mengalami peningkatan dengan bantuan yang telah diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka yang harus dilakukan pemerintah daerah agar harapan tersebut tercipta adalah dengan mengalokasikan belanja pada investasi modal (Harianto & Adi, 2007).

Elni (2019) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi mencerminkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan mengalami peningkatan, serta menggambarkan pada pembangunan dan kualitas pelayanan publik mengalami peningkatan hal ini dikarenakan tingginya investasi modal. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah dengan meningkatkan pengalokasian belanja modal ke sektor-sektor yang dianggap produktif (Nugroho dikutip dari Sugiardi & Supadmi, 2014). Pemerintah daerah harus mengalokasikan penerimaan secara adil dan merata antara belanja modal dengan belanja operasi agar pembangunan meningkat.

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk menambah aset atau kekayaan dan juga akan menambah belanja yang bersifat rutin. Pemerintah daerah berbelanja dengan tujuan untuk melakukan pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, dan transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah (Frelistiyani, 2010). Dalam melakukan pembangunan ekonomi suatu daerah yang sangat berperan penting adalah Belanja modal dikarenakan Belanja modal memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan pelayanan kepada publik (Nuarisa, 2013).

Menurut Putro (2011) ketimpangan fiskal yang terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya merupakan akibat dari kemampuan keuangan setiap daerah yang tidak sama dalam mendanai kegiatan mereka masing-masing, untuk mengatasi fenomena tersebut dana yang bersumber dari APBN dialokasikan pemerintah untuk pendanaan daerah masing-masing supaya desentralisasi suatu daerah terlaksana. Rendy (2018) menyatakan bahwa belanja modal lebih banyak dialokasikan pada belanja rumah tangga kurang produktif yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan peningkatan belanja modal. Tahun 2015 sampai 2019 dilihat dari data yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015-2019 belanja daerah yang dialokasikan pada belanja modal provinsi se-Indonesia masih rendah atau terdapat beberapa tahun yang alokasi belanja modal menurun, pada tahun 2015 belanja daerah yang dialokasikan ke belanja modal sebesar 18,1% atau senilai Rp 45.154.453.564.132 dari belanja daerah yang berjumlah Rp 248.817.586.941.033, pada tahun 2016 alokasi belanja modal turun menjadi 16,9% atau senilai Rp 44.714.4227.251.308 dari belanja daerah yang berjumlah Rp 263.957.378.259.363, sedangkan pada tahun 2017 alokasi belanja modal naik menjadi 17% senilai Rp 47.355.091.112.056 dari belanja daerah

sebesar 279.281.456.756.088, pada tahun 2018 alokasi belanja modal kembali turun menjadi 15,8% senilai Rp 51.519.460.514.732 dari belanja daerah sebesar Rp 326.284.740.606.916, dan pada tahun 2019 alokasi belanja modal mengalami penurunan kembali menjadi 14,2% senilai 50.519.279.220.806 dari belanja daerah sebesar Rp 355.916.442.806.810.

Belanja modal yang mengalami fluktuasi dari tahun 2015 ke 2019 disebabkan karena anggaran belanja mayoritas untuk belanja gaji pegawai hal ini sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan RI Ibu Sri Mulyani, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah mayoritas masih mengutamakan anggaran belanja untuk dialokasikan ke belanja gaji pegawai dibanding belanja infrastruktur. Terdapat 19% rata-rata belanja modal yang dilakukan pemda diseluruh Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Keuangan per juli 2018 anggaran belanja daerah sebesar Rp. 1.153 triliun, namun presentase sebesar 36% atau Rp. 410,6 triliun di serap untuk belanja pegawai. 23% untuk belanja barang dan jasa selebihnya 19% adalah total belanja modal pemda. Melihat data tersebut menunjukkan bahwa pemda belum efektif dalam mengalokasikan anggaran secara tepat (Kompas.com,2018). Fenomena lain ditunjukkan pada Pemerintah provinsi Riau dimana realisasi belanja yang bersumber dari APBN mencapai Rp. 15.04 triliun mengalami penurunan sebesar 3,90 dari realisasi tahun sebelumnya.

Kepala kanwil Ditjen Perbendaharaan provinsi Riau menjelaskan bahwa penurunan realisasi belanja diakibatkan karena perubahan pola belanja yang dilakukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19. Hal ini mengakibatkan belanja modal yang terealisasi hanya mncapai 22%, hal ini menunjukkan belanja modal belum bisa bisa dialokasikan secara optimal dimana tujuan belanja modal sebelumnya diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun belum terealisasi secara optimal oleh pemda provinsi Riau (Kabar Sumatera.com,2020). Realisasi belanja modal yang rendah juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Dimana hal ini dilihat dari sisa anggaran lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang masih tinggi yaitu sebesar Rp.3.26 triliun hal ini menjelaskan sekitar 9,13% bersisa dari yang dianggarkan. Tingginya SILPA mengakibatkan banyaknya program pemerintah yang tidak dilakukan secara optimal sehingga peran dan fungsi utama pemerintah untuk memberikan pelayanan publik terganggu. Selain itu menurut Iwan Fraksi PKS menyoroti terdapat realisasi belanja modal hanya Rp.2.53 triliun dari Rp.3.26 triliun yang dianggarkan, rendahnya belanja modal menghambat pembangunan infrastruktur publik yang seharusnya dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat (wartaekonomi,2019).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan yang diharapkan oleh suatu daerah, untuk pencapaian tujuan tersebut diharapkan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerahnya yang telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk mengelola keuangan pemerintah daerah masing-masing. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini dijadikan sebagai variabel pemoderasi untuk memperkuat maupun memperlemah hubungan antara PAD, kekayaan daerah, dan SILPA terhadap belanja modal. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan Sugiarti (2014) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Penelitian yang membahas keterkaitan antara DAU PAD dengan belanja modal telah dilakukan oleh Riviando et.al (2019) pada kabupaten dan kota di propinsi Sumatera Barat. Riset ini menemukan DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berikutnya penelitian Paujiah (2012) menunjukkan hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Windra (2013) menyimpulkan bahwa DAU dengan arah negatif, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Selanjutnya penelitian Supadmi (2014) menyimpulkan bahwa PAD, DAU dan SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, variabel moderasi mampu memoderasi PAD dan DAU namun tidak mampu memoderasi Variabel SILPA pada belanja modal. Penelitian Dwirandra (2014) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif

terhadap belanja modal, pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh PAD pada belanja modal tetapi dengan arah yang berlawanan.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu persetujuan (kontrak) di antara dua pihak (prinsipal dengan agen), dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Yonita dikutip Erdhi, 2015). Yonita (2011) dikutip Erdhi (2015) menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari suatu model kontraktual yang mana disaat kepentingan agen bertentangan dengan kepentingan prinsipal akan mendorong agen untuk bertindak bagi prinsipal.

Pihak *agent* bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan bagi *principal*, dan *agent* juga berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri, kenyataannya wewenang yang diberikan *principal* kepada *agent* sering bermasalah karena tujuan *principal* berbenturan dengan tujuan *agent*. Menurut Jensen ada dua macam masalah agensi yaitu: *Moral Hazard*, dan *Adverse Selection*.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut (Undang-Undang No 32, 2004) tentang “perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah“ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah serta disetujui juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mencakup anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah dan pembiayaan.

Belanja Modal

Menurut (frelistiyani, 2004) Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang membuat aset atau kekayaan daerah bertambah dan juga akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan yang ada dalam kelompok belanja administrasi umum yang masa manfaatnya melebihi satu tahun anggaran. Menurut (Permendagri Nomor 13, 2006) belanja modal adalah pembiayaan yang mana digunakan untuk pengeluaran seperti pembelian/ pengadaan dan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pos lain-lain PAD yang sah. Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah” Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah masing-masing yang mana dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kekayaan Daerah

Kekayaan daerah adalah harta atau sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kekayaan yang besar dimiliki oleh pemerintah daerah menggambarkan bahwa pelayanan publik yang lebih baik, kekayaan dapat dilihat dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki

oleh suatu daerah (Misra, 2019). Menurut PSAP aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah atas akibat dari kejadian masa lalu dan diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dimasa depan. Total aset yang dimiliki pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan kemudahan operasional dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Menurut (PP 71, 2010) lampiran I.02 PSAP 02 penyajian laporan keuangan menjelaskan bahwa SILPA adalah sisa lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu tahun periode pelaporan. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya adalah penerimaan pembiayaan daerah yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran di saat realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja (Yana, 2018). Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Dan sebaliknya jika belanja lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit maka kemungkinan akan diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA).

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Perekonomian bisa dikatakan tumbuh atau berkembang yang mana bila terjadi pertumbuhan output riil. Kuznets menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana suatu negara memiliki kemampuan untuk melakukan peningkatan dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting dalam suatu negara karena dapat melihat apakah negara tersebut telah berhasil memajukan berbagai aspek kehidupan atau tidak. Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dalam jangka panjang suatu negara (Jaeni, 2016).

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Penelitian Jaeni (2016) menemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara PAD dengan belanja modal, hasil penelitian yang serupa oleh Dwirandra dan jaya (2014) yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Maka ini dapat diartikan bahwa besarnya PAD maka pengeluaran atas belanja modal akan semakin tinggi.

Pendapatan Asli Daerah yang biasanya menjadi sumber utama dari penerimaan pemerintah. Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah, maka dari itu dapat diartikan bahwa jika pemerintah daerah ingin mengalokasikan atau menggunakan belanja modalnya, pemerintah daerah harus memperhatikan kebutuhan daerah dengan memperhatikan atau mempertimbangkan PAD yang diterima.

Maka dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya belanja modal pemerintah daerah tergantung pada besar kecilnya PAD suatu daerah, sehingga disaat pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan upaya meningkatkan belanja modal maka dari itu pemerintah daerah berusaha keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh Kekayaan Daerah terhadap Belanja Modal

Kekayaan adalah sumber daya yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah yang memiliki kekayaan lebih besar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Kekayaan dapat dilihat dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah (Usman dkk,2019).

Menurut PSAP aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah akibat kejadian masa lalu dan diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat didukung dengan aset yang baik pula. Untuk meningkatkan pelayanan pemerintah harus bisa mengalokasikan belanja modalnya untuk menambah fasilitas atau aset untuk pelayanan kepada masyarakat, semakin baik belanja modal yang dimiliki oleh pemerintah maka pelayanan untuk masyarakat semakin baik dengan fasilitas yang memadai. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal

Sumber pendanaan lainnya yang dialokasikan untuk belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik selain PAD adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 SILPA merupakan sisa lebih dana yang diperoleh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah selama satu periode.

Penelitian yang dilakukan Sugiarti dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sejalan dengan Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa SILPA adalah salah satu sumber pendapatan atau pendanaan belanja modal, karna sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Jika pendapatan lebih besar dari belanja maka terjadi surplus maka kemungkinan akan diperoleh SILPA yang lebih tinggi. Dan sebaliknya jika belanja lebih besar dari pendapatan maka terjadi defisit maka kemungkinan akan diperoleh Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Menurut Erdi & Rachmawati (2015) pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah berperan penting dalam pembangunan tersebut, yang mana pemerintah daerah harus memperhatikan faktor-faktor sumber daya alam, tenaga kerja, investasi modal, kewirausahaan, transportasi, pengeluaran pemerintah dan dukungan pembangunan. pertumbuhan ekonomi sering dijadikan istilah untuk menyatakan bahwa perekonomian suatu daerah berkembang, sejahtera, dan maju dalam jangka waktu panjang (Jaeni, 2016).

Erdi & Rachmawati (2015) menjelaskan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakannya sebagai daerah otonomi sangat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan daerah, semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh, maka pelayanan publik akan meningkat dan memajukan perekonomian daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan publik dengan melakukan belanja untuk kepentingan investasi yang direalisasi melalui belanja modal (Ardhini 2011 dikutip

Erdi, 2015). Menurut Dwirandra (2014) peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah sehingga PAD semakin meningkat, PAD yang tinggi akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik sehingga akan meningkatkan belanja modal. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi diduga dapat memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

Erdhi (2015) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada peningkatan pendapatan perkapita sehingga berdampak pada konsumsi suatu penduduk meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2014) memperoleh hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal. Berdasarkan paparan di atas hipotesis sebagai berikut:

H4: Pertumbuhan ekonomi memoderasi pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal

Menurut Misra (2019) pelayanan publik yang baik diberikan oleh pemerintah merupakan dukungan dari kekayaan yang lebih besar dimiliki oleh pemerintah daerah, yang mana kekayaan yang dimiliki oleh daerah dapat dilihat dari total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik berdampak pada peningkatan pelayanan publik yang meningkat, dalam peningkatan tersebut pemerintah mengalokasikan kekayaan daerah dengan baik. Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan mempengaruhi kekayaan suatu daerah dan berdampak pada peningkatan belanja modal suatu daerah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik hipotesis penelitian:

H5: Pertumbuhan ekonomi memoderasi kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal

PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa SILPA merupakan selisih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan. Besar kecilnya SILPA dan ada tidaknya SILPA tergantung pada tingkat belanja yang dilakukan pemerintah daerah serta kinerja pendapatan daerah. Menurut Permendagri No 13 Tahun 2006 menyatakan SILPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran anggaran daerah selama satu periode. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Pertumbuhan ekonomi diduga memperkuat pengaruh hubungan SILPA terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan Sugiarti dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan uraian di atas maka ditarik hipotesis sebagai berikut :

H6: Pertumbuhan ekonomi memoderasi SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan termasuk kedalam penelitian kausatif. Penelitian kausatif yaitu penelitian yang menganalisis pengaruh antara suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sugiyono, 2012). Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu diperoleh peneliti secara tidak

langsung atau melalui media perantara (diperoleh, dikumpulkan, dan diolah oleh pihak lain). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah (DJPk). Data yang digunakan mengenai jumlah realisasi belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), total kekayaan daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta pertumbuhan ekonomi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen-dokumen ataupun data-data yang digunakan mengenai jumlah Realisasi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Total Kekayaan daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA), serta pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.

Pengukuran Variabel

Belanja Modal

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya

Sumber : PP No 71 tahun 2010

Menurut (Permendagri Nomor 13, 2006) belanja modal adalah pembiayaan yang mana digunakan untuk pengeluaran seperti pembelian/pengadaan dan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pos lain-lain PAD yang sah. Menurut undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang “Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah” Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang diperoleh oleh pemerintah daerah masing-masing yang mana dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PAD = Pajak + Retribusi + Pengelolaan Kekayaan Daerah Terpisah + PAD Lain Yang Sah

Sumber : UU No. 33 tahun 2004

Kekayaan Daerah

Kekayaan Daerah adalah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang mana sumber daya tersebut akan digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut PSAP aset merupakan sumber daya ekonomi yang diperoleh dari akibat kejadian masa lalu yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat mengharapkan manfaat ekonomi dimasa depan. Besar kekayaan daerah diukur dengan melihat total aset.

Kekayaan Daerah = Total Asset

Sumber : Armaja *et al.*,2015

SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

Menurut PP 71 tahun 2010 lampiran I.02 PSAP 02 penyajian laporan keuangan menjelaskan bahwa SILPA adalah sisa lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu tahun periode pelaporan. Jumlah SILPA diukur dengan melihat nilai SILPA yang disajikan dalam laporan realisasi APBD.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Hasan (2012) Pertumbuhan Ekonomi adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu kegiatan pembangunan. Kuznets menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kondisi dimana suatu negara memiliki kemampuan untuk melakukan peningkatan dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada pendukungnya.

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Sumber : Kusumawardani, Dewi(2009)

Keterangan :

G = Tingkat pertumbuhan ekonomi

PDRB1 = PDRB tahun uji

PDRB0 = PDRB sebelum tahun uji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,13391693
Most Extreme Differences	Absolute	,059
	Positive	,027
	Negative	-,059
Test Statistic		,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas menjelaskan bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Sig > 0,05 yaitu 0,200 > 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai residual data penelitian berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinieritas

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,525	,303		11,628	,000		
Log_x1	-,032	,039	-,052	-,829	,408	,269	3,716
Log_x2	,606	,046	,845	13,098	,000	,251	3,983
Log_x3	,084	,024	,155	3,571	,000	,553	1,807
PM	,001	,003	,014	,429	,669	,990	1,010

a. Dependent Variable: Log_Y

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2 diatas menjelaskan bahwa nilai tolerance pada masing-masing variabel nilai tolerance > 0,10 dan pada nilai VIF terlihat bahwa nilai VIF <10, ini menjelaskan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastisitas

Tabel 3 Hasil Uji Heterokedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,387	,183		2,112	,036
Log_x1	-,022	,023	-,138	-,932	,353
Log_x2	-,003	,028	-,015	-,095	,924
Log_x3	,002	,014	,013	,127	,899
PM	,001	,002	,025	,326	,744

a. Dependent Variable: abs_RES

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 3 diatas menjelaskan bahwa uji masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai sig > 0,05, hal ini menjelaskan bahwa kesimpulan dari uji heterokedastisitas adalah tidak terjadi heterokedastisitas.

4. Uji autokorelasi

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,910 ^a	,828	,823	,13553	1,844

a. Predictors: (Constant), PM, Log_x1, Log_x3, Log_x2

b. Dependent Variable: Log_Y

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Hasil uji autokorelasi pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *Durbin Watson* sebesar 1,844. Angka tersebut menunjukkan bahwa nilai D-W berada diantara -2 sampai +2 ($-2 < D-W < +2$). Nilai D-W berada diantara $-2 > 1,844 < +2$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat

disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,527	,302		11,665	,000
	Log_x1	-,032	,039	-,051	-,825	,410
	Log_x2	,605	,046	,843	13,130	,000
	Log_x3	,085	,023	,157	3,636	,000

a. Dependent Variable: Log_Y

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 5 diatas dapat di peroleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 3,527 - 0,032 (PAD) + 0,605 (KD) + 0,085 (SILPA) + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,910 ^a	,827	,824	,13520

a. Predictors: (Constant), Log_x3, Log_x1, Log_x2

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 6 diatas menggambarkan bahwa besar nilai *Adjusted R square* adalah 0,824. Hal ini menjelaskan bahwa kontribusi variabel independent Pendapatan Asli Daerah (PAD), kekayaan daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah sebesar 82,4% untuk sisanya sebesar 17,6% ditentukan oleh faktor lain diluar penelitian.

Uji F (Simultan)

Tabel 7 Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14,546	3	4,849	265,270	,000 ^b
	Residual	3,034	166	,018		
	Total	17,580	169			

a. Dependent Variable: Log_Y

b. Predictors: (Constant), Log_x3, Log_x1, Log_x2

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan tabel 7 diatas menggambarkan bahwa hasil uji F mempunyai signifikansi sebesar 0,000 dimana sig 0,000 < 0,05, hal ini menjelaskan bahwa secara bersama-sama variabel independent (PAD, kekayaan daerah, dan SILPA) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent (Belanja Modal). Ini berarti bahwa persamaan regresi yang didapat bisa diandalkan.

Uji t (Hipotesis)

Tabel 8 Hasil Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,527	,302		11,665	,000
	Log_x1	-,032	,039	-,051	-,825	,410
	Log_x2	,605	,046	,843	13,130	,000
	Log_x3	,085	,023	,157	3,636	,000

a. Dependent Variable: Log_Y

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat nilai PAD sebesar 0,41. Nilai probabilitas $0,41 > 0,05$. Artinya PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. hal ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota dengan PAD yang besar tidak menggambarkan bahwa belanja modal yang besar. Hal ini disebabkan karena PAD yang diterima lebih diprioritaskan pada belanja lain, seperti belanja rutin. Rendy (2018) menyatakan bahwa kabupaten dan kota yang memiliki PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar, hal ini dikarekan bahwa PAD yang diterima lebih banyak dilokasikan untuk membiayai belanjapegawai, belanja rutin/operasional, dll.

Nilai probabilitas kekayaan daerah sebesar 0,000. Nilai probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) diterima, karena kekayaan daerah yang tinggi akan meningkatkan belanja modal, begitu sebaliknya jika kekayaan daerah rendah maka belanja modal akan rendah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa SILPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal juga diketahui karena SILPA di setiap provinsi di Indonesia digunakan untuk belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan belanja asset tetap lainnya dan nilai SILPA sebesar 0,000.

Nilai Probabilitas $0,000 < 0,05$. Artinya SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima, Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa SILPA adalah salah satu sumber pendapatan atau pendanaan belanja modal, karna sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SILPA yang besar akan meningkatkan Belanja modal dan begitu sebaliknya,

Moderated Regression Analysis (MRA)

**Tabel 9 Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4,244	9,550		,444	,658
	log_X1	-,072	,759	-,127	-,094	,925
	log_X2	,557	,739	,785	,753	,454
	log_X3	,097	,037	,207	2,621	,011
	PM	-,207	,546	-,824	-,379	,706
	PAD*PM	,002	,058	,066	,029	,977
	log_x2.z	,020	,040	,045	,495	,622
	SILPA*PM	,016	,045	,784	,365	,717

a. Dependent Variable: log_y

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel 9 diatas dapat membuat persamaan *moderated Regresssion Analysis* (MRA) sebagai berikut :

$$Y = 4,244 - 0,072X_1 + 0,557X_2 + 0,097X_3 + 0,002X_1.Z + 0,020X_2.Z + 0,016X_3.Z + 9,550$$

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

**Tabel 10 Hasil Uji Regresi sebelum ada variabel moderasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,763 ^a	,583	,580	,20900

a. Predictors: (Constant), log_X1

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

**Tabel 11 Hasil Uji Regresi sesudah ada variabel moderasi
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,902 ^a	,813	,809	,14079

a. Predictors: (Constant), PAD*PM, PM, log_X1

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel 10 diatas terlihat nilai R Square sebesar 0,583, hal ini mejelaskan bahwa partisipasi variabel PAD terhadap variabel Belanja Modal sebesar 58,3%, setelah adanya variabel moderasi atau dapat kita lihat pada tabel 11 nilai R Square meningkat menjadi 0,813 atau 81,3%. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ke empat diterima, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel pertumbuhan ekonomi (sebagai variabel moderasi) dapat memperkuat pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh Kekayaan daerah terhadap Belanja Modal.

Dalam penelitian ini hipotesis kelima adalah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal. Berikut tabel hasil Uji MRA :

Tabel 12 Hasil Uji Regresi sebelum ada variabel moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,902 ^a	,814	,813	,13966

a. Predictors: (Constant), log_X2

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Tabel 13 Hasil Uji Regresi sesudah ada variabel moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,878 ^a	,770	,760	,13930

a. Predictors: (Constant), log_x2.z, log_X2, PM

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel 12 diatas terlihat nilai R Square sebesar 0,814, hal ini menjelaskan bahwa partisipasi variabel kekayaan daerah terhadap variabel belanja modal sebesar 81,4%, setelah adanya variabel moderasi atau dapat kita lihat pada tabel 13 nilai R Square menurun menjadi 0,770 atau 77%. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima ditolak, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel pertumbuhan ekonomi (sebagai variabel moderasi) memperlemah pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Artinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh PAD terhadap belanja modal akan meningkat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus meningkatkan pengalokasian belanja daerahnya ke belanja modal dan menggunakan pendapatan asli daerahnya ke belanja modal. pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuat pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal menurun. Pada saat pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat ini menggambarkan bahwa fasilitas dan pelayanan disuatu daerah tersebut sudah baik, maka dari itu pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan mengalokasikan ke belanja lainnya seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal

Dalam penelitian ini hipotesis keenam adalah Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal. Berikut tabel hasil Uji MRA :

Tabel 14 Hasil Uji Regresi sebelum ada variabel moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,675 ^a	,456	,452	,23866

a. Predictors: (Constant), log_X3

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Tabel 15 Hasil Uji Regresi sesudah ada variabel moderasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,676 ^a	,457	,447	,23976

a. Predictors: (Constant), SILPA*PM, log_X3, PM

Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021

Dari tabel 14 diatas terlihat nilai R Square sebesar 0,456, hal ini menjelaskan bahwa partisipasi variabel SILPA terhadap variabel belanja modal sebesar 45.6%, setelah adanya variabel moderasi atau dapat kita lihat pada tabel 15 nilai R Square meningkat menjadi 0.457 atau 45,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam diterima, maka dapat dikatakan bahwa keberadaan variabel pertumbuhan ekonomi (sebagai variabel moderasi) memperkuat pengaruh SILPA terhadap Belanja Modal. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berarti bahwa penerimaan atau pendapatan daerah lebih besar dibandingkan pengeluaran daerah, dan ini menjelaskan bahwa jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran maka SILPA tahun berjalan meningkat. Ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pembiayaan anggaran untuk belanja modal dan akan di alokasikan ke belanja lain seperti belanja pegawai, barang dan jasa dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal, disini menjelaskan bahwa pendapatan suatu daerah yang tinggi akan meningkatkan anggaran belanja modal. Menurut Made (2018) salah satu faktor penentu dalam menentukan anggaran belanja modal adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana alokasi belanja modal disesuaikan dengan kebutuhannya serta mempertimbangkan PAD yang diterima.

Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. Dengan hasil yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eka Pariani pada tahun 2018 yang mana juga memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa kabupaten dan kota dengan PAD yang besar tidak menggambarkan bahwa belanja modal yang besar, hal ini disebabkan karena PAD yang diterima lebih diprioritaskan pada belanja lain, seperti belanja rutin.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan Erdi Adyatma (2015) memperoleh hasil bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Arbie Gugus Wandira (2013) memperoleh hasil bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, dan penelitian yang dilakukan oleh Widya Yana (2018) memperoleh hasil yang sama bahwa PAD tidak memiliki pengaruh terhadap belanja modal. Hal ini menjelaskan bahwa PAD yang tinggi belum menentukan bahwa pengeluaran pemerintah atas belanja modal akan semakin tinggi, karna penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah juga digunakan untuk belanja lain-lain.

Hasil penelitian ini berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian Kartika Jaya dan Dwirandra (2014), Jaeni (2016), Wimpi Priambudi (2017), Rudi Hermawan (2017), Desak Made Mya Yudia Sari (2018). Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dari hasil penelitian terdahulu ini menjelaskan bahwa PAD yang semakin tinggi membuat belanja modal mengalami peningkatan, begitu sebaliknya jika PAD menurun maka belanja modal mengalami penurunan.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa PAD tidak signifikan mempengaruhi belanja modal karena peningkatan pada PAD tidak sebanding dengan peningkatan belanja modal. Berdasarkan hasil analisis peneliti beberapa Provinsi di Indonesia pada tahun 2015-2019 rata-rata pada lima tahun tersebut menjelaskan bahwa jumlah PAD dialokasikan pada belanja modal tidak sebanding dengan peningkatan PAD, diantaranya adalah Provinsi Sumatera Utara yang mana rata-rata PAD dari lima tahun tersebut berjumlah 5,3 triliun dan

alokasi ke belanja modal hanya 25,2% atau sebesar 1,3 triliun, dan Provinsi Jawa Barat rata-rata PAD dari lima tahun tersebut berjumlah 18,4 triliun dengan alokasi kebelanja modal hanya 14,3% atau sebesar 2,6 triliun. Sehingga dapat kita nilai bahwa pada Provinsi Sumatera Utara dan Jawa Barat menjelaskan bahwa alokasi belanja daerah lebih banyak digunakan pada belanja lain-lain seperti belanja pegawai, belanja hibah dibandingkan pada belanja modal. Rendy (2018) menyatakan bahwa kabupaten dan kota yang memiliki PAD yang besar cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar, hal ini dikarekan bahwa PAD yang diterima lebih banyak dilokasikan untuk membiayai belanja pegawai, belanja rutin/operasional, dan lain-lain. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti memperoleh atau mendapatkan data PAD terbaru serta pengujian analisis regresi berganda.

Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ke dua dalam penelitian ini adalah kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, yang dimana kekayaan dapat dilihat pada total aset yang dapat menggambarkan besarnya sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah (Usman dkk, 2019). Kekayaan merupakan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil uji atau hasil penelitian yang dilakukan penelitian ini, peneliti memperoleh hasil bahwa kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal, dimana dengan hasil yang diperoleh maka hipotesis ke dua (H2) diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang dapat menambah aset atau kekayaan daerah. Dimana semakin tinggi kekayaan daerah suatu daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang menunjukkan hasil bahwa kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, karena kekayaan daerah yang tinggi akan meningkatkan belanja modal, begitu sebaliknya jika kekayaan daerah rendah maka belanja modal akan rendah. Hasil penelitian tersebut didukung oleh data yang menunjukkan bahwa benar kekayaan daerah yang meningkat membuat belanja modal juga meningkat, yaitu pada provinsi Aceh pada tahun 2018 kekayaan daerah berjumlah 24,1 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 28,4 triliun, dan pada peningkatan kekayaan daerah juga diikuti oleh belanja modal pada tahun 2018 belanja modal berjumlah 2,5 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 3,1 triliun. Dan begitu sebaliknya bahwa benar kekayaan daerah yang rendah mengakibatkan belanja modal rendah, Provinsi Lampung kekayaan daerah tahun 2018 berjumlah 88,8 triliun dan pada tahun 2019 menurun menjadi 9,7 triliun dan penurunan kekayaan daerah tersebut juga diikuti penurunan pada belanja modal pada tahun 2018 berjumlah 1,7 triliun dan pada tahun 2019 menurun menjadi 1,0 triliun. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti memperoleh atau mendapatkan data Kekayaan daerah terbaru serta pengujian analisis regresi berganda.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ke tiga dalam penelitian ini adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja, dimana hal tersebut menjelaskan bahwa jumlah SILPA yang besar akan meningkatkan anggaran belanja modal suatu daerah. Liliana et.al dalam Supdami (2014) menyatakan bahwa hubungan antara pendapatan pemerintah daerah dan pengeluaran pemerintah daerah merupakan hubungan yang sangat penting, karena ada tidaknya SILPA tergantung besarnya penerimaan dengan pengeluaran.

Berdasarkan hasil uji yang dilakukan peneliti memperoleh hasil bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, maka

hipotesis ketiga (H3) diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang tedahulu yaitu penelitian yang dilakukan Sugiarti dan Supadmi (2014) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Dan Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Maka dari hasil tersebut menunjukkan bahwa SILPA adalah salah satu sumber pendapatan atau pendanaan belanja modal, karna sisa lebih pembiayaan anggaran tersebut akan dialokasikan ke dalam belanja modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SILPA yang besar akan meningkatkan Belanja modal dan begitu sebaliknya, dari analisis peneliti data yang mendukung hasil penelitian ini yaitu pada povinsi papua ditahun 2018 SILPA sebesar 1,0 triliun dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 2,7 triliun diikuti dengan peningkatan belanja modal pada tahun 2018 berjumlah 1,9 triliun dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 2,2 tiliun. Sebaliknya jika SILPA menurun maka belanja modal juga menurun berikut data yang mendukung pada provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 SILPA berjumlah 9,7 triliun dan pada tahun 2019 menurun menjadi 1,2 triliun dan diikuti penurunan belanja modal pada tahun 2018 berjumlah 14,1 triliun menuun pada tahun 2019 menjadi 11,5 triliun.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa SILPA bepengaruh signifikan terhadap belanja modal juga diketahui karna SILPA di setiap provinsi di Indonesia digunakan untuk belanja modal yang terdiri dari belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan belanja asset tetap lainnya. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan peneliti, peneliti memperoleh atau mendapatkan data SILPA terbaru serta pengujian analisis regresi berganda.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal

Hipotesis ke empat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal, dimana pertumbuhan ekonomi yang baik akan bepengaruh langsung terhadap besarnya jumlah PAD yang akan membuat PAD meningkat sehingga dapat memaksimalkan belanja modal untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran. Pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang penting dalam suatu negara karena dapat melihat apakah negara tersebut telah berhasil memajukan berbagai aspek kehidupan atau tidak. Istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk menyatakan perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, kemajuan ekonomi dalam jangka panjang suatu negara (Jaeni, 2016).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memperkuat atau memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dimana hipotesisi ke empat (H4) diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwirandra (2014) yang memperoleh hasil bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan serta mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rian Yudhi Setiawan (2018) dimana memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak bepengaruh dalam memoderasi pendapatan asli daerah(PAD) terhadap belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh PAD terhadap belanja modal. Atinya, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka pengaruh PAD terhadap belanja modal akan meningkat. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pemerintah harus meningkatkan pengalokasin belanja daerahnya ke belanja modal dan menggunakan pendapatan asli daerahnya ke belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Kekayaan Daerah Terhadap Belanja Modal

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal. Dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal. Tujuan dalam pembangunan adalah supaya perekonomian di daerah meningkat, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan membuat sumber daya atau asset yang diperoleh akan meningkat, dan ini berarti bahwa pembiayaan anggaran banyak dialokasikan pada belanja modal.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal (H5) ditolak. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membuat pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal menurun. Pada saat pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat ini menggambarkan bahwa fasilitas dan pelayanan di suatu daerah tersebut sudah baik, maka dari itu pemerintah daerah akan mengurangi pengalokasian belanja modalnya dan mengalokasikan ke belanja lainnya seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal

Hipotesis keenam dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan ekonomi memoderasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat berpengaruh langsung pada besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sehingga pemerintah dapat mengotimalkan penggunaan anggaran.

Dalam penelitian ini memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti bahwa hipotesis keenam (H6) diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afrizal Surya Saputra (2020) yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh SILPA terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supadmi (2014), dan penelitian yang dilakukan oleh F.Fahmi yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh SILPA terhadap belanja modal.

Dalam penelitian ini yang memperoleh hasil bahwa pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal. Artinya adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan membuat pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal meningkat. Pada saat pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat maka dapat diartikan bahwa perekonomian suatu daerah tersebut membaik.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi ini berarti bahwa penerimaan atau pendapatan daerah lebih besar dibandingkan pengeluaran daerah, dan ini menjelaskan bahwa jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran maka SILPA tahun berjalan meningkat. Ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah akan mengurangi pembiayaan anggaran untuk belanja modal dan akan di alokasikan ke belanja lain seperti belanja pegawai, barang dan jasa dan lain-lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan penelitian ini sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
2. Kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
4. Pertumbuhan ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal pada provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
5. Pertumbuhan ekonomi tidak memoderasi (memperlemah) pengaruh kekayaan daerah terhadap belanja modal pada provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.
6. Pertumbuhan ekonomi memoderasi (memperkuat) pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada Provinsi se-Indonesia tahun 2015-2019.

KETERBATASAN

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), kekayaan daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) maka memberi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggunakan variabel lain yang mempengaruhi belanja modal.
2. Rentang waktu data yang digunakan peneliti hanya 5 tahun periode yaitu tahun 2015-2019.
3. Penelitian ini menganalisis data hanya menggunakan uji *moderated Regression Analysis* (MRA) untuk menguji variabel independen dan interaksi variabel moderasi dengan variabel independen.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan peneliti menyarankan :

1. Peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi belanja modal.
2. Pemerintah provinsi diharapkan dapat memperhatikan alokasi anggaran yang khususnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), supaya dapat mengupayakan alokasinya banyak ke belanja modal.
3. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat menggunakan data terbaru serta menggunakan metode analisis yang lain untuk menguji hipotesisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, D. H. (2007). Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Per Kapita.
Apa itu Pertumbuhan Ekonomi Dan Teori Pendukungnya. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://bloguangguru.com>.
- Dwirandra, P. N. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.1 (2014)* .
- Elni. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal . *E-jurnal Katalogis Vol 4 No 2* , 1-11.
- frelistiyani, H. D. (2004). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening.
- Frelistiyani, W. (2010). Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim. (2011). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.

- Jaeni, G. A. (2016). *Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal*. ISBN .
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Misra, U. D. (2019). Pengaruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan. *E-jurnal Akuntansi*, 7792, 2019 .
- Nugroho, F. (2012). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening.
- Oktaviani, E. A. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol 4 No 2* , 190-205.
- Pamudji, N. S. (2011). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Penaglokasian Anggaran Belanja Modal. *Pengertian Belanja Modal, Jenis Dan kriteria Belanja Modal*. (t.thn.). Diambil kembali dari <http://www.e-akuntansi/> Pengertian Belanja Modal , Jenis dan Kriteria Belanja Modal.
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 53 Ayat (1). (t.thn.).
- Permendagri Nomor 13. (2006).
- Permendagri Nomor 13. (2013). *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah* .
- Permendagri Nomor 33. (2019).
- PP 71. (2010). *lampiran I.02 Penyajian Laporan Keuangan* .
- PP No 24. (2005). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* .
- PP Nomor 58 . (2005). *Tentang Pengelolaan keuangan Daerah* .
- Prakoso, K. B. (2004). Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendptan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah. *JAAI Volume 8 no 2* .
- Prasetya, I. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Belanja Pegawai Terhadap Pengelokasian Anggaran Belanja. *Jurnal Akuntansi 5 (2), 2017* , 1.
- Priambudi, W. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Vol.06 No 01* .
- Riviando, Adel; Agustin, Henri; Halmawati. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indek Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. 1(1). Seri A. 1-17
- Regina Usman, F. M. (2019). Penagruh Kekayaan Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Pengujian Legislativ Power Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-JA Vol 29 No 2* .
- Rendy Armando Kakasih, G. M. (2018). Pengaruh pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara Periode 2009-2016. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.18 No 02* .
- Supadmi, N. P. (2014). Pengaruh PAD, DAU, Dan SILPA Belanja modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udyana 7.2 (2014)* .
- Undang-Undang No 32. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* .
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. (t.thn.).
- Windra, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi 2 (1) 2013* .
- Yana, W. (2018). Pengaruh PAD, DAU, DBH, Dan DOK Terhadap Belanja Modal dengan SILPA sebagai Variabel Pemoderasi .